

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2020



DAFTAR ISI

02. DAFTAR ISI

03. ABSTRAK

04. STRUKTUR ORGANISASI

06. PELAKSANAAN

11. KESIMPULAN

A

b

s

t

r

a

k

SEKILAS TENTANG PPID

Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

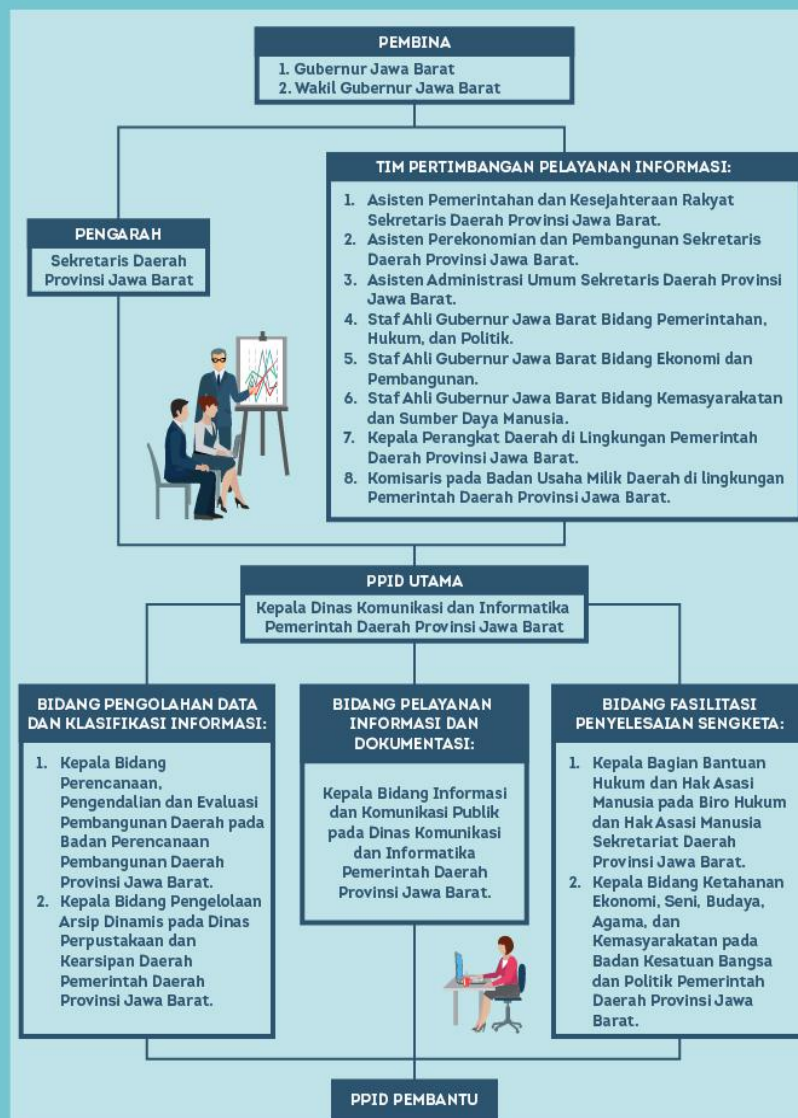
Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan informasi dan dokumentasi pada setiap Badan Publik di Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Untuk PID di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki Keputusan Gubernur Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

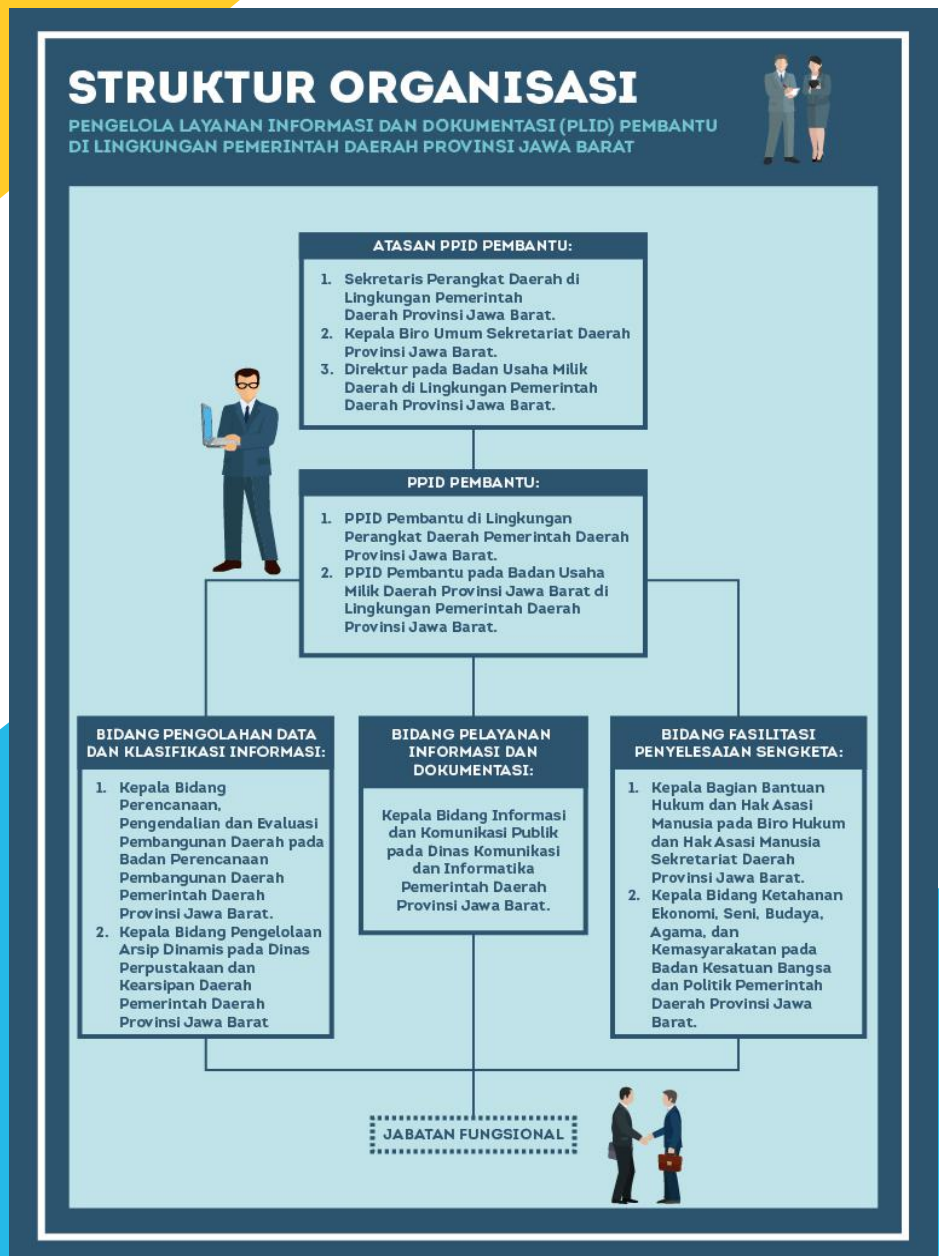
STRUKTUR ORGANISASI PPID UTAMA

STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU



P

e

I

a

k

s

a

n

a

a

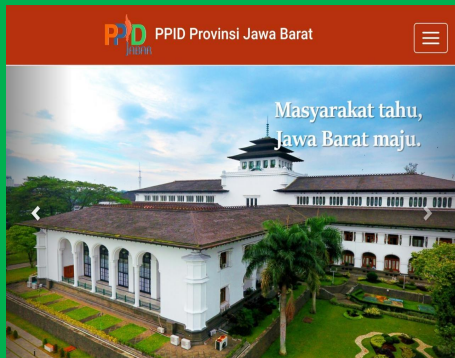
n

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk pelayanan PPID Utama Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, yang membawahi 46 Organisasi Perangkat Daerah sebagai PPID Pembantu dan secara bersama-sama melakukan koordinasi untuk selalu meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik .

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik melalui laman <http://ppid.jabarprov.go.id>. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan Informasi Publik melalui web dan email (ppid@jabarprov.go.id) PPID Jawa Barat, maupun datang langsung ke Desk Layanan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI



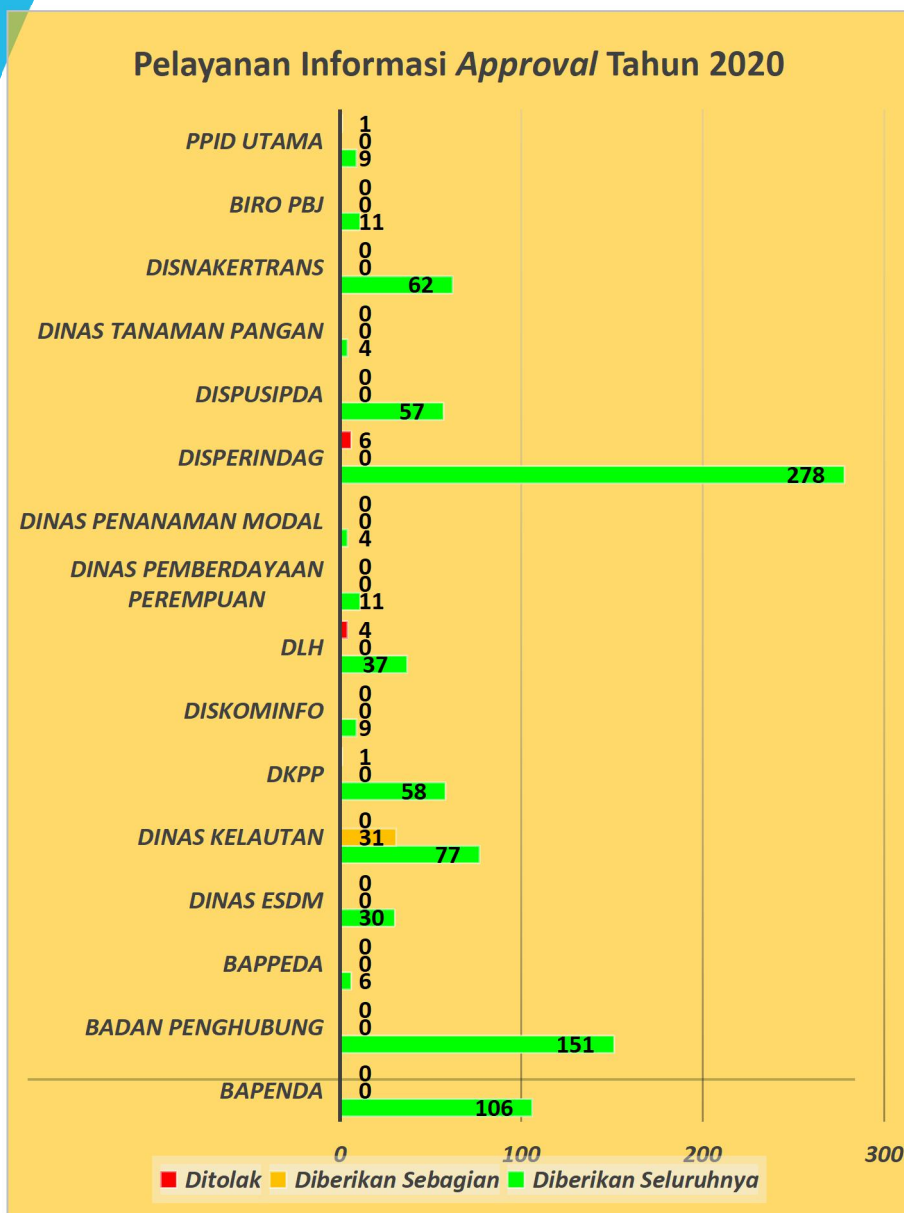
Jumlah Permohonan Informasi Publik tahun 2020, baik melalui laman <http://ppid.jabarprov.go.id>, email ppid@jabarprov.go.id, ataupun datang langsung ke Desk Layanan di PPID Utama dan Pembantu Provinsi Jawa Barat sebanyak 953 permohonan.

Rekapitulasi Tahun 2020



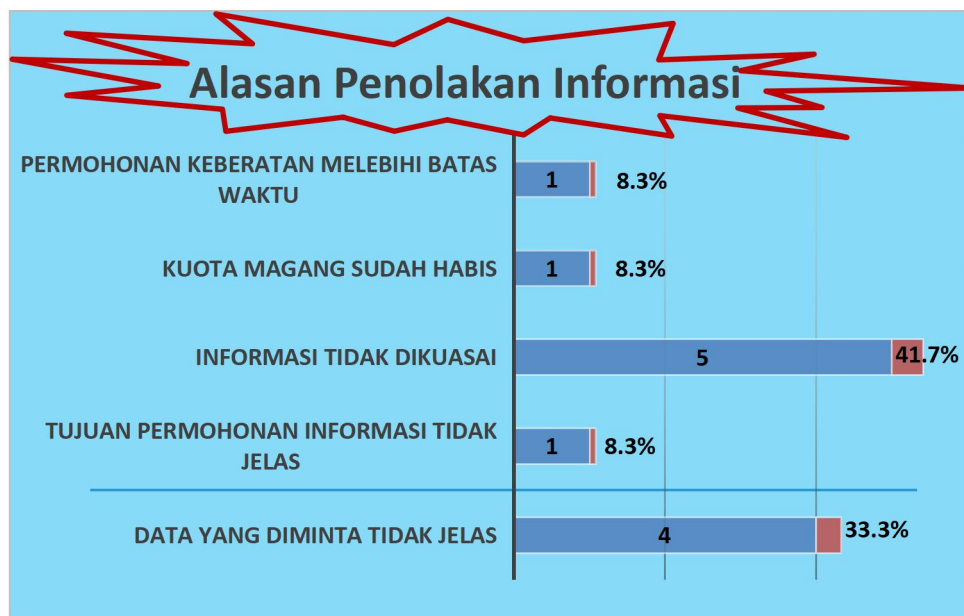
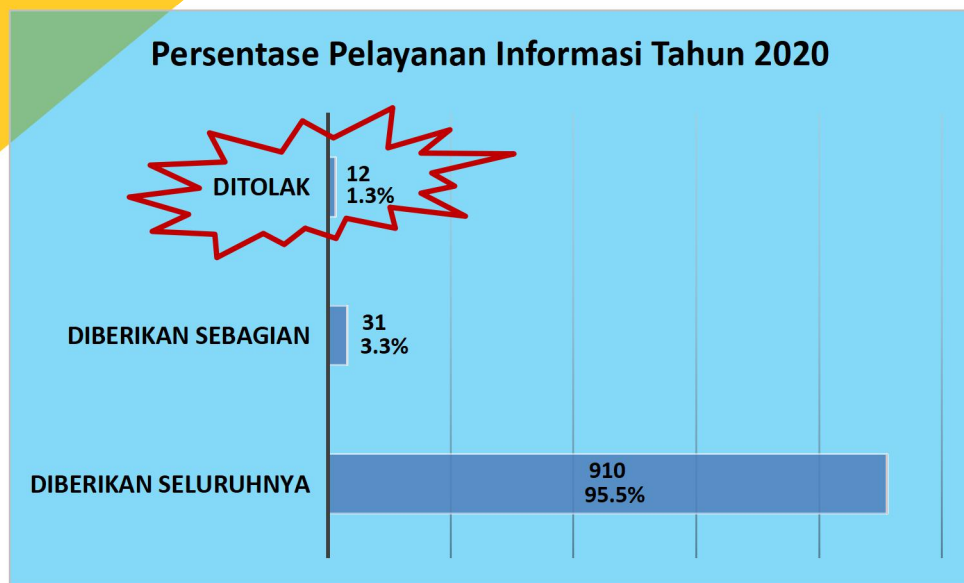
JUMLAH INFORMASI YANG DIBERIKAN

Dari total seluruh 953 permohonan terdapat 910 permohonan diberikan seluruhnya, 31 permohonan diberikan sebagian, dan 12 permohonan ditolak



ALASAN PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

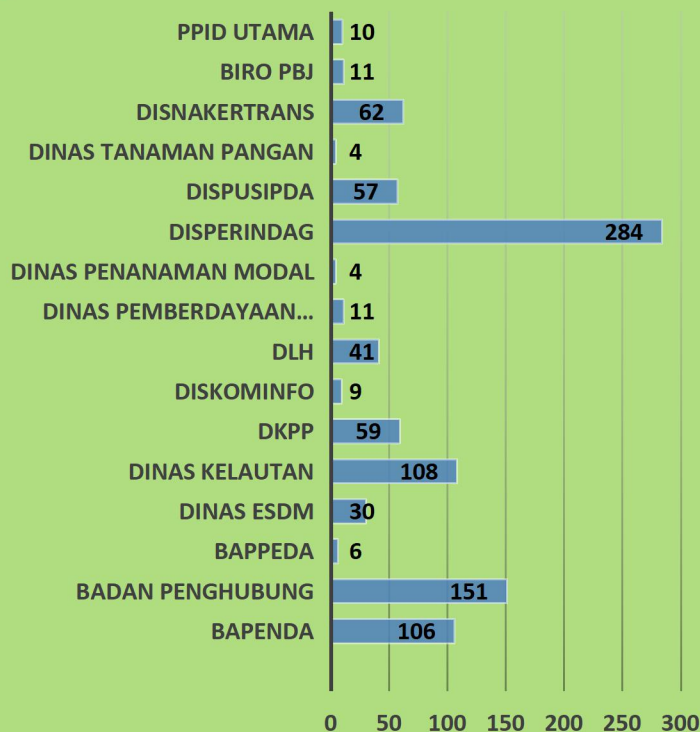
Dari 12 permohonan yang ditolak, dapat dirinci sebagai berikut :



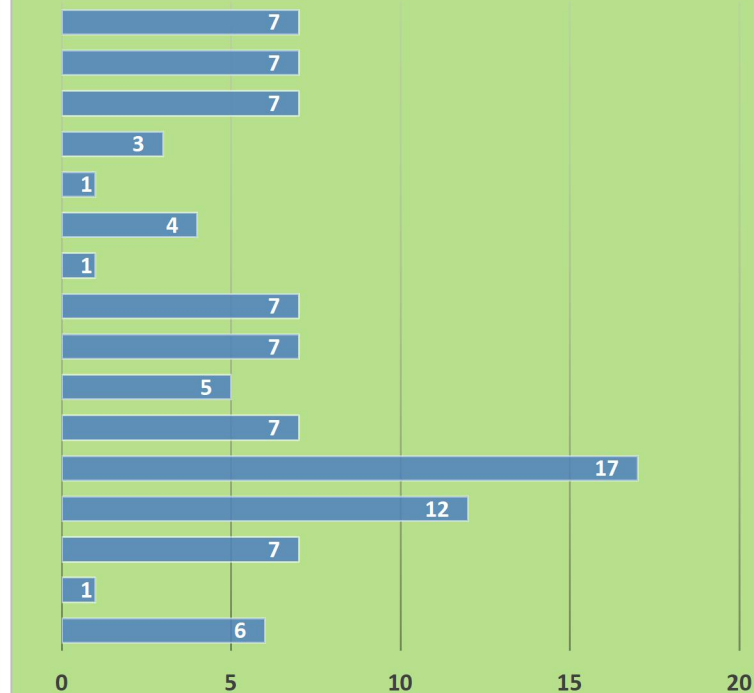
WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN INFORMASI

Rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan informasi adalah jumlah hari oleh semua instansi dibagi jumlah instansi sehingga 99 hari dibagi 16 instansi menjadi rata-rata 6 hari.

Jumlah Permohonan Tahun
2020



Ratas Waktu Pelayanan (Hari)



K

e

s

i

m

p

u

l

a

n

KENDALA & HAMBATAN

1. Koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu sering terhambat, sehingga seringkali proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik tidak berjalan sesuai standar;
2. Jumlah SDM yang terbatas disertai beban tugas ganda, terlebih Pejabat Fungsional Pranata Kehumasan, Komputer dan Arsiparis pada Perangkat Daerah masih minim; dan
3. Rotasi Jabatan tanpa adanya *transfer of knowledge*, sehingga pemahaman pejabat struktural yang membidangi PPID saat terjadi penggantian hampir selalu dimulai dari nol.

REKOMENDASI

Berdasarkan tantangan dan hambatan tersebut di atas, kami merumuskan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pelayanan permohonan informasi publik;
2. Rapat koordinasi berkala dengan agenda kegiatan yang beragam, misalnya *workshop*, *Training of Trainers* (ToT), seminar, bimbingan teknis dan lain sebagainya;
3. Berkenaan dengan peran pengawasan dan pembinaan terhadap PPID Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, PPID Utama Provinsi Jawa Barat perlu memperkuat Forum Koordinasi PPID Pemerintah Daerah di Jawa Barat.